

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan sistem yang efisien dan terintegrasi semakin meningkat. Instansi, baik pemerintah maupun swasta, seringkali menghadapi tugas dan proses yang semakin kompleks, seperti pengelolaan data yang besar, transaksi keuangan, manajemen sumber daya manusia serta pengawasan yang lebih ketat. Sistem yang terkomputerisasi memungkinkan instansi untuk mengelola tugas-tugas ini secara lebih efisien dan efektif. Tanpa adanya sistem yang terorganisir, pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat menjadi lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan manusia. Sistem memungkinkan otomatisasi berbagai proses, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara lebih optimal. (Laudon & Laudon, 2020).

Keamanan dan akurasi data merupakan hal yang sangat penting dalam setiap instansi, terutama yang berhubungan dengan data pribadi, transaksi keuangan, atau informasi sensitif lainnya. Sistem komputerisasi membantu mengurangi risiko kesalahan manusia serta memastikan bahwa data yang disimpan tetap aman, terstruktur dengan baik, dan mudah diakses sesuai kebutuhan. Dalam instansi publik atau layanan pelanggan, kebutuhan untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan responsif sangat tinggi. Sistem yang baik memungkinkan pelayanan yang lebih cepat dan meningkatkan kualitas layanan dengan mempermudah komunikasi, mempercepat proses permintaan, serta memperjelas status dari setiap proses yang berlangsung. (Ibrahim et al., 2020).

Sistem informasi yang baik menyediakan data yang akurat dan terkini, yang sangat berguna untuk membantu pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem yang mendukung pemrosesan dan analisis data, pimpinan instansi dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan

berbasis data. Kebutuhan akan sistem yang baik dan tepat sangat penting bagi instansi untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar, efisien, dan produktif. Sistem ini tidak hanya mendukung kegiatan internal tetapi juga memungkinkan instansi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (Ibrahim et al., 2020; Hugo Studio, 2020; Unmaha, 2020).

Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di berbagai instansi pemerintahan sering menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya meliputi kurangnya integrasi sistem, kesalahan input data, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, dan ketidakmampuan sistem dalam mendeteksi atau mencegah kesalahan dan kecurangan. Hal ini dapat mengakibatkan risiko yang cukup signifikan, seperti pembayaran gaji yang tidak tepat, pengeluaran yang tidak sah, hingga pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Instansi pemerintahan, sebagai salah satu lembaga publik, mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi akuntansi penggajian yang diterapkan mampu mendukung pengendalian internal secara efektif. Pengendalian internal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku hingga pengawasan atas pengelolaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab. (Gunawan et al., 2024).

Sebagai salah satu lembaga negara yang mempunyai perangkat daerah, Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dibawah urusan daerah dan memiliki tanggungjawab pada bupati melalui sekretaris daerah. Membantu bupati dalam urusan administrasi yang berkaitan dengan perdagangan dan perindustrian daerah serta memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab daerah merupakan fungsi pokok Dinas Perdagangan. Sebagai bagian dari mandatnya, Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo bertanggung jawab atas berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan, termasuk pembuatan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat melaksanakan praktik magang pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo terdapat

adanya kendala atau masalah mengenai sistem informasi akuntansi penggajian yaitu Terkait dengan peran sistem informasi akuntansi penggajian yang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman teori, pemisahan antara fungsi pemrosesan penggajian (pembuatan daftar gaji) dan pelaporan keuangan (fungsi keuangan) perlu dilakukan. Hal ini agar sejalan dengan prinsip pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi penggajian, yang didasarkan pada teori pengendalian internal dan teori akuntabilitas. Fungsi pembuat daftar gaji dikerjakan oleh sub bagian perencanaan dan keuangan yaitu bendahara pengeluaran. Pemisahan tugas (*segregation of duties*) merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan maupun kecurangan. Prinsip ini menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam proses transaksi, seperti otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset, harus dipisahkan dan dijalankan oleh orang yang berbeda.

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), pemisahan fungsi ini merupakan komponen penting dalam kerangka kerja pengendalian internal untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks instansi pemerintahan, hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menegaskan bahwa pengendalian intern harus dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi penggajian masih terdapat rangkap fungsi, seperti pembuatan dan pembayaran gaji oleh orang yang sama, maka hal tersebut menjadi indikator lemahnya penerapan pengendalian internal yang efektif dan berisiko menimbulkan penyimpangan.

Penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya oleh Hendrik Gamaliel, Lifry Corry Ertavina, dan Hendrik Manossoh (2023). Penelitian mereka mengungkapkan bahwasanya SIA penggajian pada BPN Sulawesi Utara masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini mencakup prosedur penggajian yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teori pengendalian internal, khususnya terkait prinsip segregation of duties. Hal ini terlihat dari masih dirangkapnya fungsi penyusunan dan pengelolaan pembayaran gaji oleh unit kepegawaian, yang seharusnya dipisah guna menghindari risiko kecurangan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

Penelitian Wahyuni (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait SIA penggajian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini mencakup pegawai yang tidak menerima gaji tepat waktu karena penyampaian data yang tertunda, sistem yang tidak memadai, catatan dan dokumen akuntansi yang tidak sesuai teori, dan kurangnya pemisahan fungsi terkait. Oleh karena itu, pengawasan diperlukan untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan dalam penggajian.

Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan beberapa penelitian sebelumnya mengenai sistem informasi akuntansi penggajian pada lembaga sektor publik atau instansi dimana dari beberapa penelitian terdahulu tersebut masih terdapat kendala sehingga belum efisien dan efektifnya sistem informasi akuntansi penggajiannya. Permasalahan yang masih sering terjadi diantaranya yaitu lemahnya pengawasan terhadap pengendalian internal, seperti pengawasan terhadap fungsi pencatatan waktu kehadiran, pencatatan kartu kehadiran, ketidakhadiran (atau kesalahan dalam pencatatannya), penggunaan dokumen dan catatan akuntansi yang tidak sesuai teori, serta fungsi-fungsi yang terkait masih terjadi perangkapan tugas. Sehingga masih terdapat kelemahan pada sistem informasi akuntansi penggajian.

Dengan adanya permasalahan tersebut, pentingnya dilakukan analisis terhadap sistem informasi akuntansi penggajian di instansi

pemerintah, khususnya pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dari sistem yang diterapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar sistem informasi akuntansi penggajian mampu berjalan lebih optimal, mendukung transparansi keuangan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh tuntutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama untuk pengelolaan sumber daya manusia serta keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi akuntansi penggajian yang efektif dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan efisiensi, meningkatkan pengendalian internal, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Penelitian ini bertujuan memberikan partisipasi bagi peningkatan sistem informasi akuntansi penggajian yang lebih baik di instansi pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, sekaligus menjadi referensi bagi instansi lainnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan penggajian dan keuangan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang dan hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti bermaksud untuk mengkaji penerapan sistem informasi akuntansi penggajian untuk mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi sistem informasi akuntansi penggajian pegawai yang ditetapkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan pengendalian internal dengan judul penelitian Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian pada Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam Meningkatkan Pengendalian Internal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, masalah utama yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo mendukung efektivitas pengendalian internal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penggajian di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem informasi akuntansi penggajian guna meningkatkan pengendalian internal di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini mampu memperbanyak serta memperluas wawasan penulis serta pembaca dalam bidang Sistem Informasi Akuntansi Penggajian.
 - b) Penelitian ini untuk referensi atau bahan landasan untuk peneliti yang akan mengadakan penelitian secara mendalam terkait dengan masalah yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a) Evaluasi dan Perbaikan Sistem: memberikan masukan yang bersifat konstruktif terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi penggajian yang telah diterapkan, sehingga instansi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kelemahan yang ada.

b) Penguatan Pengendalian Internal: membantu instansi dalam mengidentifikasi aspek-aspek sistem penggajian yang belum optimal dalam mendukung pengendalian internal, seperti pemisahan tugas (segregation of duties), otorisasi, dan dokumentasi.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan atau evaluasi untuk pihak instansi pemerintah Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo dalam membuat kebijakan yang lebih baik dalam sistem informasi akuntansi penggajian dalam upaya meningkatkan pengendalian internal.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitian di instansi pemerintah yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo. Ruang Lingkup yang ada pada permasalahan dan penelitian yang dilakukan meliputi penerapan sistem informasi akuntansi penggajian dalam meningkatkan pengendalian internal yang ada di Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo.